



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA PURWOKERTO

**DJKN**

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

JALAN PAHLAWAN NOMOR 876 PURWOKERTO 53143  
TELEPON : (0281) 630454; FAKSIMILE : (0281) 630451; SUREL : [kpknlpurwokerto@kemenkeu](mailto:kpknlpurwokerto@kemenkeu)



*Senantiasa Melayani Anda dengan penuh PESONA  
Profesionalisme, Efisien dan Efektif, Sinergi, Optimal, Nyaman dan Amanah*

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga *good governance* yang merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara dapat terlaksana. Untuk itu setiap tahun anggaran berakhir instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini renstra tahun 2020 s.d. tahun 2024.

Menindaklanjuti hal itu maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPKNL Purwokerto menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk mengukur kinerja KPKNL Purwokerto itu sendiri selama tahun anggaran 2023 sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas berdasarkan visi yang diembannya selama ini yaitu : “*MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT*”.

Pada tahun 2023 capaian kinerja KPKNL Purwokerto baik, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai **116,36%** yang terdiri dari *Stakeholder Perspective* 25%, *Customer Perspective* 15%, *Internal Process Perspective* 30% dan *Learning & Growth Perspective* 30%. Capaian tersebut merupakan kontribusi menyeluruh dari semua Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwokerto yang telah dilaksanakan oleh semua subbagian, seksi-seksi dan fungsional, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja KPKNL Purwokerto dapat tercapai dengan baik. Dalam kondisi pandemi *covid-19*, KPKNL Purwokerto tetap dituntut dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, dengan menjalankan protokol kesehatan, baik dilingkungan kantor maupun pada saat menjalankan tugas di luar kantor, sehingga pelayanan kepada *stakeholder* dapat berjalan baik.



Laporan Kinerja ini tersusun berkat kerja keras dan ketekunan para pihak yang terlibat dalam hal penyajian data yang diperlukan dan pengolahannya, untuk itu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik. Selanjutnya agar laporan ini dapat dipakai sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan dilandasi prinsip CARE (*Committed, Able, Responsive, and Enthusiastic*) serta dilandasi pula oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, kami berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, disamping sebagai tolak ukur kegiatan saat ini dan masa yang akan datang.

Purwokerto, Januari 2024  
Kepala Kantor

Ali Mahmud

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto ini disusun sebagai bagian dari perwujudan praktek *good governance* khususnya di lingkungan KPKNL Purwokerto dan sebagai laporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2022. Di samping itu selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, juga akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun anggaran 2022, dari 11 sasaran strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2022, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik yakni sebesar 114,12% untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Purwokerto yang pada tahun 2022 mendapatkan alokasi dana DIPA (belanja barang dan modal) sebesar Rp1.759.942.000,00 dapat kami realisasikan sebesar Rp1.681.109.566,00 atau 95,52%.

Dengan terwujudnya sasaran-sasaran tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memenuhi visi dan misi KPKNL Purwokerto. Capaian Kinerja dari 11 Sasaran Strategis dengan 20 IKU yang dilaksanakan KPKNL Purwokerto selama tahun 2022 menurut masing-masing perspektif dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai sebesar 30%;
2. *Customer Perspective* dengan bobot IKU 15% tercapai sebesar 17,36%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 34,16%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 32,60%;

Salah satu prestasi KPKNL Purwokerto yang berhasil di capai pada tahun 2022 yaitu berhasil meraih predikat ZI-WBBM (Zona Integritas-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Nilai Capaian IKU ZI-WBBM dari TP-E1, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJKN nomor ND-4393/KN,1/2022 tanggal 20 Desember 2022 Nilai Akhir Capaian IKU Pembangunan ZI-WBBM KPKNL Purwokerto = 94,13 atau tercapai 110,74 % dari target. Sebuah prestasi yang layak dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi. Hal ini perlu agar dapat menunjukkan konsistensi KPKNL Purwokerto dalam peningkatan kinerja dan dalam melakukan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan.

Hasil capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik namun demikian masih terdapat permasalahan atau hambatan yang menonjol pada tahun 2022 yaitu :

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;
2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Data PNBPN BMN sering terlambat masuk di awal bulan (melewati tanggal laporan LCK)
4. Proses sertifikasi terkendala dengan belum adanya BAST dari Pemprov Jateng kepada Satker PJJ II.
5. Penyerahan BKPN dari Kantor Pusat tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai yang memiliki kekuatan hukum;
6. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
7. Masih banyak outstanding BKPN lama dan banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
8. Sebagian BKPN penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung BJ yang memadai / potensi tertagih rendah
9. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
10. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
11. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP);
12. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
13. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;
14. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, lelang Hak Tanggungan yang masih terkendala pengosongan, kondisi pandemi covid-19;
15. Terdapat indikator pada Formulasi PKPA yang saling kontradiksi sehingga cenderung sulit mendapatkan nilai yang maksimal
16. Terdapat penambahan anggaran belanja modal dipertengahan tahun yang membuat nilai IKPA OMPSAN tidak bisa maksimal
17. Wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

Untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah antara lain :

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, profesional dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Rapat koordinasi antara Kantor Pertanahan, Satker dan DJKN untuk mencapai kesepakatan mendasar terhadap kendala-kendala yang dihadapi
3. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Sosialisasi kepada satker terkait proses profiling calon penyewa.
6. Melakukan koordinasi dengan satker terkait penyelesaian BKPN;
7. Percepatan Penyelesaian Piutang Negara melalui *Crash Program*
8. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 213/PMK.06/2020 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;
9. Melaksanakan koordinasi dengan Pemohon Lelang terkait syarat-syarat permohonan lelang yang harus dipenuhi, terutama lelang Hak Tanggungan dalam dalam upaya pencapaian target organisasi terutama produktivitas lelang melalui permohonan sukarela khususnya lelang UMKM dari Perbankan.;
10. Melaksanakan penggalian potensi lelang sukarela;
11. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara);
12. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
13. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
15. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
16. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
17. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	1
	B. Peran Strategis
	4
	C. Sistematika Laporan
	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	7
	A. Penetapan Kinerja
	7
	B. Pengukuran Kinerja
	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	12
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama
	12
	B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
	16
	C. Realisasi Anggaran
	45
BAB IV	PENUTUP
	46
Daftar Lampiran :	
	A. Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto tahun 2022
	B. Lembar Penetapan Manual IKU
	C. Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
	D. Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Purwokerto tahun 2022

## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sebagai kantor pelayanan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dipimpin oleh seorang Kepala, dengan susunan organisasi :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil, Jabatan Fungsional Pelelang, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto meliputi wilayah Kabupaten :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| a. Banyumas     | e. Cilacap   |
| b. Banjarnegara | f. Purworejo |
| c. Purbalingga  | g. Wonosobo  |
| d. Kebumen      |              |

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Purwokerto pada tahun 2023 didukung oleh 48 orang pegawai dengan posisi sebagai berikut :

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Kepala Kantor                                     | : 1 orang    |
| b. Kepala Sub Bagian Umum                            | : 15 Pegawai |
| c. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara          | : 9 Pegawai  |
| d. Kepala Seksi Piutang Negara                       | : 5 Pegawai  |
| e. Kepala Seksi Hukum dan Informasi                  | : 6 Pegawai  |
| f. Kepala Seksi Kepatuhan Internal                   | : 4 Pegawai  |
| g. Pejabat Fungsional Pelelang                       | : 4 Pegawai  |
| h. Pejabat Fungsional Penilai                        | : 3 Pegawai  |
| i. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil | : 1 Pegawai  |

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan (posisi tahun 2023) sebagai berikut:

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
2.	Pembina (IV/a)	5
3.	Penata Tk.I (III/d)	9
4.	Penata (III/c)	11
5.	Penata Muda Tk.I (III/b)	12
6.	Penata Muda (III/a)	4
7.	Pengatur Tk.I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	0
9.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1
10.	Pengatur Muda (II/a)	1
	<b>Total</b>	<b>48</b>

Komposisi pegawai pada tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan formal terakhir sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S2	7
2.	S1/DIV	30
3.	D3	4
4.	D1	3
5.	SMA	3
6.	SMP	0
7.	SD	1
	<b>Total</b>	<b>48</b>

## B. PERAN STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis sebagai berikut :

### 1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Purwokerto memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Purwokerto mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam bentuk peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

### 2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

### 3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset di muka umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Purwokerto secara terus menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga diharapkan lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun

PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dengan keuntungan yang ditawarkan tersebut diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet maupun *disposal asset*. DJKN dalam hal ini KPKNL Purwokerto diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka metode penjualan melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui aplikasi *e-auction*. Lelang melalui *e-auction* menjadi salah satu terobosan yang dilakukan guna menjawab perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dalam melakukan penjualan barang. Salah satu keunggulan *e-auction* yakni pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung.

#### **4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara**

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN melalui KPKNL Purwokerto memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Melalui optimalisasi pengelolaan BMN berupa pemanfaatan juga dapat meningkatkan penerimaan negara berupa PNBP.

### C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Ringkasan Eksekutif**, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan langkah-langkah antisipatif yang diambil.

**Bab I. Pendahuluan**, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

**Bab II. Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2023.

**Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Purwokerto Tahun 2023.

**Bab IV. Penutup**, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan, selama tahun 2023, KPKNL Purwokerto telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto di tahun yang akan datang.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

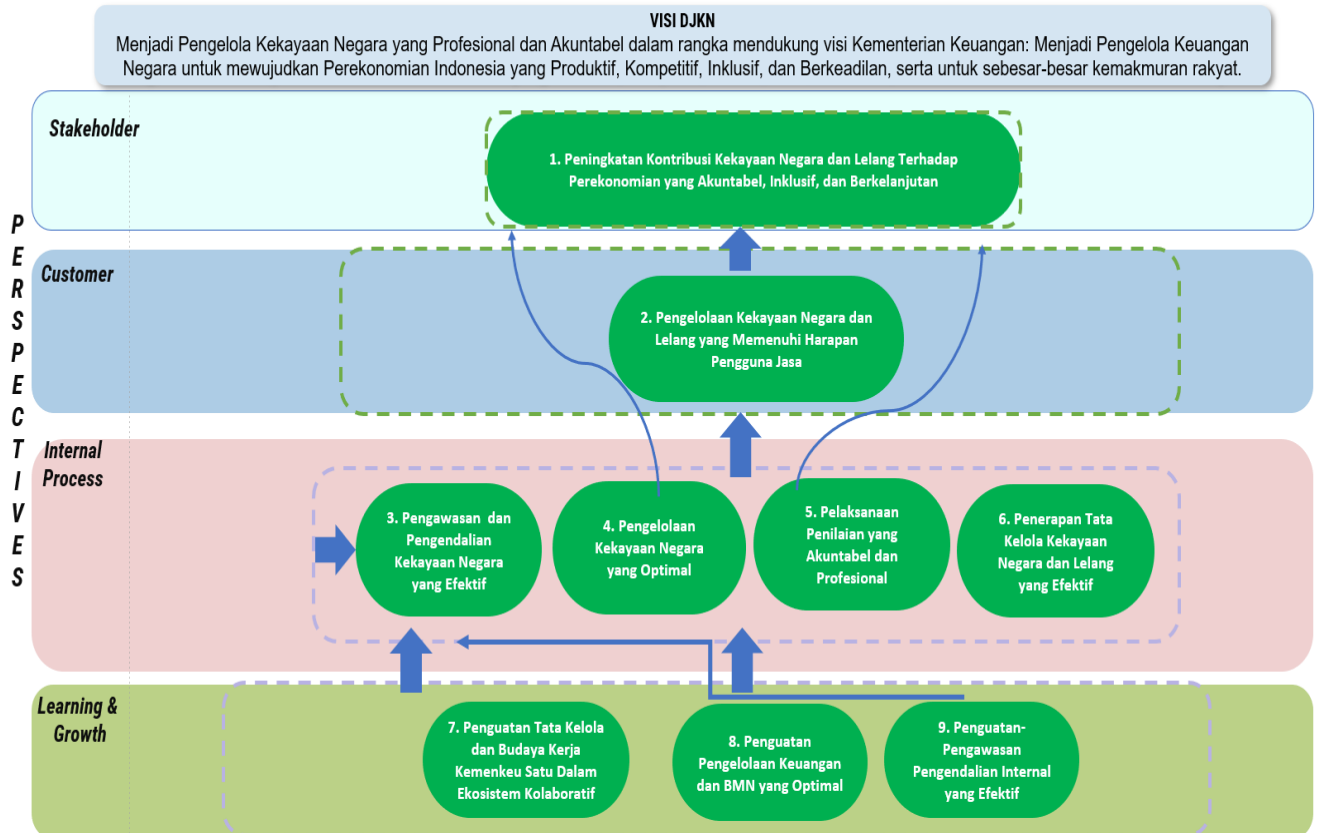
**A. PENETAPAN KINERJA**

Sesuai kontrak Kinerja antara Kepala KPKNL Purwokerto dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023, maka KPKNL Purwokerto diberikan tugas untuk dapat mencapai target yang telah disepakati untuk tahun 2023.

**Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

**Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**  
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

**Peta Strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto**



Gambar 2.1 Peta Strategi DJKN

Jelas tergambar dari Peta Strategi diatas bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai 9 sasaran strategis yang terbagi dalam 4 *perspective* yang masing-masing sasaran strategis tersebut dijabarkan lagi kedalam Indikator Kinerja Utama sebagai kinerja yang harus dicapai dalam tahun bersangkutan. Peta Strategi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 KPKNL Purwokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
		1c-CP	Indeks Integritas	88.67
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Pengawasan dan pengendalian kekayaan negara	3a-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan	86%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang efektif	Pengelolaan Barang Milik Negara	
4.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	4a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan		100%	
4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara		100%	
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien	70
6.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		6b-N Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%
		6c-N Persentase	86%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pelaksanaan permohonan lelang online	
7.	Penguatan tata Kelola dan budaya kerja kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-CP Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		8b-CP Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8c-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-CP Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	80
		9b-CP Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60
		10c-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	90

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2023

## B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2023, kami mengacu pada DJKN yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120 dan angka minimum adalah 0
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$ Memenuhi ekspektasi	$80 \leq X < 100$ Belum memenuhi ekspektasi	$X < 80$ Tidak memenuhi ekspektasi

3. Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
4. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai Kontrak Kinerja tahun 2023 KPKNL Purwokerto mempunyai 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu *Three*. Rincian capaian kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2023 seperti telah disajikan pada tabel.

Capaian Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2023 disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini :

#### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KPKNL PURWOKERTO TAHUN 2023

##### NILAI KINERJA ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO PERIODE TRIWULAN IV

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Iku	Bobot Tertimbang	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							33.64%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							112.14%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	124.57%	14%	30%	124.57%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	105.00%	14%	30%	131.25%	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88.67	89.17	19%	40%	100.56%	100.56%	hijau
	Customer Perspective(20%)							24.00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120.00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	136.14%	14%	50%	136.14%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	120.32%	14%	50%	120.32%	120.00%	hijau

	Internal Process Perspective (25%)							29.13%	
3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							111.91%	
3a-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	96.25%	14%	100%	111.91%	111.91%	hijau
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							120.00%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	P/L	68%	87.10%	19%	36.5%	128.09%	120.00%	hijau
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/L	100%	131.05%	19%	36.5%	131.05%	120.00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	132.62%	14%	26.9%	132.62%	120.00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
5a-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	99.97	14%	100%	142.81%	120.00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							114.19%	
6a-CP	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	186.67%	14%	33%	186.67%	120.00%	hijau
6b-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	100.00%	14%	33%	106.38%	106.38%	hijau
6c-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	P/M	86%	99.91%	14%	33%	116.17%	116.17%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29.59%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120.00%	
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							115.07%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	105.2	14%	33%	105.20%	105.20%	hijau
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	172.00%	14%	33%	172.00%	120.00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15%	0.00%	14%	33%	120.00%	120.00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120.00%	
9a-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	98.23	14%	50%	122.79%	120.00%	hijau
9b-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	97.28	14%	50%	162.13%	120.00%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>116.36%</b>	<b>hijau</b>

Semua IKU dapat mencapai target dengan capain **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 116,36%**.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

### 1. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang :
  - Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang s.d. Triwulan IV tahun 2023 sebesar **Rp 17.336.953.231,-** atau **124,55%** dari target tahunan (Q4) setelah adendum sebesar **Rp 13.920.120.000,-**. Target awal sebelum adendum **Rp 10.076.620.000,-** adendum I **Rp 10.132.620.000,00**, dengan rincian pencapaian sebagai berikut :
    - a. Realisasi nominal PNBP Kekayaan Negara (BMN) sebesar Rp 7.835.188.408,00 (122,83%) dari target sebesar Rp 6.379.120.000,00;
    - b. Realisasi nominal PNBP PN sebesar Rp 55.745.300,00 (121,19%) dari target sebesar Rp 46.000.000,00;
    - c. Realisasi nominal PNBP Lelang sebesar Rp 9.446.019.523,00 (126,03%) dari target sebesar Rp 7.495.000.000,00

- ✓ Akar masalah :

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

- Potensi PNBP semakin berkurang
- PNBP berupa sewa kantin/ATM
- Satker Strategis Bukan Satker KPKNL Purwokerto (DJKA, Tanah LP Nusakambangan, TNI)
- Data PNBP BMN selalu terlambat masuk di awal bulan (melewati tanggal laporan LCK)

Seksi Piutang Negara :

- Potensi BKPN yang dapat tertagih semakin berkurang karena terdapat pelunasan melalui crash program.
- Penerimaan biad PPN Sebagian besar dari penerimaan angsuran/pelunasan BKPN penyerahan pemerintah Daerah/RSUD.

Pelayanan Lelang:  
Banyak Lelang TAP.

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :  
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

- Konfirmasi Formal dan Non Formal (UIN saizu, Unsoed, kintah banyumas, KPBC PWT, KPP PWT)
- Wasdal ( dilakukan secara simultan dengan kegiatan lain)
- Koordinasi dengan Jafung Pelelang (konfirmasi Hari/tanggal lelang dan hasil lelang)
- Koordinasi intensif dg KPPN dilakukan setiap bulan dengan ND

Seksi Piutang Negara :

- Profiling BKPN
- Melanjutkan penagihan langsung kepada penanggung hutang dengan menawarkan crash program keringanan hutang
- Penggalian potensi piutang negara dari Pemda

Pelayanan Lelang:

- Penggalian potensi lelang

✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

- Mematakan BNM RB (SIMAN)
- Penghapusan (meminta satker untuk mengajukan penghapusan)
- Melanjutkan Rencana aksi wasdal dan koordinasi

Seksi Piutang Negara :

- Profiling BKPN
- Melanjutkan penagihan langsung kpd PH dengan menawarkan crash program keringanan hutang
- Penggalian potensi piutang negara dari Pemda

Pelayanan Lelang:

- Koordinasi dan penggalian potensi lelang dengan pemohon lelang

Evaluasi Capaian Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	137,14%	146,72%	84,09%	130,05%	139,55%	TLK
Capaian	120%	120%	84,09%	120%	120%	120%

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2018

## 2. Persentase Produktivitas Lelang

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase produktivitas lelang :
  - Rumus Produktifitas :  

$$\text{Jumlah Lelang Laku} + \text{wanprestasi} / (\text{Laku} + \text{Wanprestasi} + \text{TAP})$$
 Capaian akhir = **131,25%** dari target tahunan
- ✓ Akar masalah :
  - Banyak permohonan di akhir tahun
  - Banyak lelang TAP dari perbankan (lelang eksekusi HT)
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Penggalan potensi lelang laku
  - Memperbanyak lelang sukarela (UMKM )
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Koordinasi dan penggalan potensi lelang dengan pemohon lelang
  - Memperbanyak lelang sukarela (UMKM )

Evaluasi Capaian Persentase produktivitas lelang Tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	30%	32%	34%	35%	36%	80%
Realisasi	25,66%	27,90%	36,37%	39,67%	44,28%	105%
Capaian	85,55%	87,17%	106,98%	113,34%	120%	131,25%

## 3. Indeks Integritas

- ✓ Isu utama dan Implikasi Hasil indeks integritas DJKN:
  - Hasil indeks integritas DJKN tahun 2023 adalah 89,17 sehingga capain 100,56%.
  - Telah dilakukan kick off meeting survai penilaian integritas tahun 2023 pada tanggal 3 Juli 2023.
  - Tahapan SPI tahun2023
    - a. Persiapan survei (pengumpulan long list) bulan Mei –Juni 2023
    - b. Survai oleh KPK bulan Juli-Oktober 2023
    - c. FGD dan IDI (oleh tim SPI Kemenkeu) bulan November 2023
    - d. Kalibrasi dan Validasi data (oleh tim SPI Kemenkeu 2023) bulan Desember 2023

e. Penyampaian hasil bulan Januari 2024

#### 4. Persentase Realisasi Pokok Lelang

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait realisasi Pokok Lelang :
  - Realisasi capaian pokok lelang KPKNL Purwokerto s.d Desember Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 280.416.562.166,00 (136,14%)** dari target tahunan (Q4) setelah addendum sebesar Rp 205.981.000.000,- (target sebelum adendum Rp. 101,850,000,000,-) dengan rincian sebagai berikut :
    1. Realisasi Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp 202.504.981.566,- atau (125,09%) dari target tahunan setelah adendum sebesar Rp 161.881.000.000,- (sebelum adendum Rp 57.750.000.000,-).
    2. Realisasi Pokok Lelang pegadaian sebesar Rp 77.911.580.600,- atau (176,67%) dari target tahunan sebesar Rp 44.100.000.000,-.
- ✓ Akar Masalah :
  - Banyak permohonan lelang.
  - Banyak lelang TAP dari perbankan (lelang eksekusi Hak Tanggungan).
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang potensial Laku
  - Memperbanyak lelang sukarela (UMKM)
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang potensial Laku

Evaluasi Capaian Persentase hasil lelang Tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105,64%	109,87%	78,08%	174,36%	186,61%	136,14%
Capaian	105,64%	60,69%	78,08%	120%	120%	136,14%

## 5. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2021):
  - Realisasi persentase penurunan nilai outstanding piutang negara s.d. triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 3.579.765.487,- atau (120,32%.) dari target tahunan (Q4) setelah addendum sebesar Rp 2.975.300.000,-.
  - Addendum pertama di Q2 dari Rp1.200.000.000,- menjadi Rp 2.600.000.000,-
- ✓ Akar masalah
  - Terdapat penyerahan BKPN didukung dengan barang jaminan namun sulit terjual lelang dan BKPN yang didukung dengan barang jaminan lain berupa leter C, sehingga menyulitkan proses pengurusan untuk penurunan outstanding (PSBDT).
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Melakukan Penagihan langsung maupun panggilan kepada debitur;
  - Terhadap objek CP keringanan hutang, melakukan kerjasama dengan DJBC dan DJP, Kerjasama dengan Pemda/Kelurahan untuk mendapatkan e-KTP ;
  - Mengajukan permohonan cegah tangkal;
  - Melakukan pemeriksaan/penelitian lapangan Bersama dengan PP dalam rangka mencari harta kekayaan lain PH (Debitur tracing);
  - Melakukan koordinasi dengan PP maupun instansi terkait dalam rangka mengusulkan Tindakan keperdataan dan/atau pembatasan Tindakan pelayanan publik.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
  - Dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kemampuan dan keberadaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang.
  - Mengirimkan surat tagihan penyelesaian hutang yang ditujukan kepada PH/PjH
  - Selalu menginformasikan adanya Crash Program Tahun Anggaran 2023 berupa keringanan utang kepada PH/PjH penyerahan dari instansi pemerintah pusat.
  - Melakukan sosialisasi PMK Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN.

Evaluasi Capaian Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2021) sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target				100%	100%	100%
Realisasi				162%	136,29%	120,32%
Capaian				120%	120%	116,43%

## 6. Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara :
  - Merupakan IKU yang diukur secara tahunan. Tetapi untuk monitoring capain s.d. triwulan IV tahun 2023 dapat dihitung sbb:
  - Jumlah persetujuan yang diterbitkan semester II 2022 = 41
  - Jumlah Persetujuan yang ditindaklanjuti oleh K/L Semester II 2022 = 38
  - Jumlah persetujuan yang diterbitkan semester I 2023 = 38
  - Jumlah persetujuan yang ditindaklanjuti oleh K/L Semester I 2023 = 37
  - Realisasi adalah  $((38/41)+(37/38))= 96,25\%$
  - Berdasarkan target tahunan 86% capaiannya sebesar 111,91%
- ✓ Akar Masalah :
  - Potensi PNBP yg belum tinjau oleh satker
  - Satker menggunakan Kembali BMN yang telah terbit persetujuan
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Monev tindak lanjut semua persetujuan yang telah ditetapkan kepada Satker.
  - Koordinasi intensif dengan KPPN terkait PNBP.
  - Monitoring tindak lanjut semua persetujuan yang telah ditetapkan.
  - Koordinasi dengan Kemenkumham terkait tindak lanjut kapal.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Aktif Koordinasi dan menyurati satker terkait permasalahan tindak lanjut PKN untuk menggali solusi/menjadi perhatian satker.
  - Dokumentasi dan monitoring secara database internal perkembangan tahapan tinjau PKN.

Evaluasi Capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara Tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	50%	70%	80%	85%	85%	86%
Realisasi	95%	85%	92,86%	89,01%	95,18%	96,25%
Capaian	120%	120%	116,07%	104,72%	111,98%	111,91%

### 7. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

- ✓ Isu utama terkait tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK:
  - Realisasi SBSK s.d. triwulan IV tahun 2023 yang dihitung berdasarkan tingkat kesesuaian yaitu sebesar 87,10% dengan target Q4 (68%) capainnya adalah 128,09%.
  - Sedangkan berdasarkan capaian NUP yaitu telah tercapai 431 NUP sdh diupload
  - Hal-hal terkait SBSK :
    - a. 431 NUP disebarakan Formnya ke Satker.
    - b. 431 Form telah diterima dan telah diunggah.
  
- ✓ Akar Masalah :
  - Kendala pemahaman tata cara pengisian form.
  - SDM merangkap tugas lain.
  - Kesadaran Satker.
  
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan
  - Sosialisasi kepada 31 Satker, Tata Cara Pengisian Form data Dukung
  - Penyebaran form ke satker sebanyak 431 form
  - Permintaan Pengembalian Form
  
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
  - Asistensi pengisian form kesesuaian SBSK.
  - Permintaan Pengembalian Form.

Evaluasi Capaian Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2020	2021	2022	2023
Target	100%	62%	65%	68%
Realisasi	100%	76,63%	85,51%	87,10%

Capaian	120%	120%	120%	128,09%
---------	------	------	------	---------

### 8. Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan:
  - Realisasi Sertifikasi s.d. triwulan IV tahun 2023 berdasarkan target NUP yaitu:
    - K1 = 845 Bidang
    - K2 = 7 NUP
    - K3 = 398 NUP
    - K4 = 30 NUP
  - Capaian persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan s.d. triwulan IV tahun 2023 yakni 1279 NUP atau 131,05% dari target Q4 sebesar 976 NUP (100%).
  - Jumlah SHP Yang Terbit (bidang): 450 Bidang
    - 343 DJKA
    - 1 Kejari Cilacap
    - 4 Zidam
    - 7 BBWS SO Banyumas
    - 31 BBWS SO Kebumen
    - 21 BBWS SO Purbalingga
    - 5 BBWS SO Purworejo
    - 1 UIN SAIZU
    - 1 Dinas Pertanian Jawa Tengah di Purbalingga
    - 30 DITJEN PAS Kemenkumham
    - 6 Bandara Tunggul Wulung
  
- ✓ Akar Masalah :
  - Pada Satuan Kerja POLRES Wonosobo (1 bidang) dan Kebumen (1 bidang), para ahli waris belum memberikan surat pelepasan hak sebelum ada jaminan keamanan secara tertulis dari POLRES tersebut.
  - 9 (sembilan) bidang tanah kategori K4 merupakan tanah yang proses pensertifikatannya dilakukan secara mandiri oleh Satuan Kerja melalui jasa notaris sehingga memerlukan waktu penyelesaian relatif lebih lama.

- Pada satker ZIDAM, terdapat 33 bidang tanah yang merupakan sempedan pantai yang menurut pendapat dari pihak Kantor Pertanahan tidak dapat diterbitkan sertifikatnya.
  - Pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian, sejumlah 42 Bidang tidak memiliki dokumen pendukung untuk pengajuan permohonan sertipikasi selain catatan SIMAK dan bukti SPM saat pengadaan tanah.
  - Adanya Perbedaan sudut pandang antara Kantor Pusat Pertanahan (Kementerian ATR/BPN) dengan unit vertikal dibawahnya, dimana menurut Kantor Pusat Pertanahan untuk bidang tanah kategori K2 dan K3 bisa diterbitkan Peta Bidang Tanahnya sementara menurut unit vertikal (KantorPertanahan) untuk Kategori K2 dan K3 suatu BMN berupa tanah juga harus clean and clear. Hal tersebut dapat menyebabkan terkendalanya proses sertifikasi tanah DJKA sebanyak 995 bidang dan bidang tanah pada satker BTP sebanyak 42 bidang; PJI II Jateng sebanyak 43 bidang.
  - Pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian, sejumlah 42 Bidang tidak memiliki dokumen pendukung untuk pengajuan permohonan sertipikasi selain catatan SIMAK dan bukti SPM saat pengadaan tanah.
  - Tanah satker PJI II sebanyak = 42 bidang saat ini telah bersertifikat atas nama Pemprov Jateng, sehingga proses sertifikasi harus menunggu Penyerahan / BAST sertipikat dari Pemprov Jateng.
  - Pada Satker BBWS terdapat 49 bidang tanah yang telah terbit sertipikatnya, namun belum diketahui lokasi tanah tersebut. BBWS masih meminta bantuan verifikasi dan identifikasi kepada Kantah Wonosobo.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
- Rakor Sertifikasi 26 Januari 2023 (Kick Off Meeting);
  - Menyurat ke KPKNL Pemilik Satker yaitu KPKNL Jakarta I, KPKNL Tasikmalaya, KPKNL Semarang, KPKNL Yogyakarta;
  - Menyurat ke Seluruh Satker, yaitu 9 satker Subordinasi, 7 satker KPKNL Purwokerto;
  - Rapat Sertifikasi dengan Kantah kab. Cilacap, satker Ditjen KA
  - Rapat Sertifikasi Kejari Cilacap, balai Teknik Perkeretaapian, bandara Tunggalwulung, DJKA, BBWS Serayu Opak, PJI II, Zidam IV
  - Koordinasi Informal dengan petugas 14 satker Subordinasi, 6 satker, KPKNL Purwokerto.
  - Rapat sertifikasi dengan kantah kabupaten kebumen dengan satker Zidam IV Diponegoro, BBWS Serayu Opak, PJI II, DJKA, balai Teknik Perkeretaapian .
  - Menyurat ke satker yang melakukan proses permohonan sertifikasi mandiri.
  - Menyurat kepada Satker Pemilik Target K.3 (PJI II, DJKA, BBWS) untuk melakukan identifikasi lokasi asset dan diinput pada aplikasi SIPETIK);
  - Menghadiri Serah Terima 6 SHP pada satker Bandara Tunggal Wulung.

- ✓ Tindakan yang akan dilakukan:
  - Koordinasi ke 2 Satker Besar (Ses DJKA, Kepala BBWS Serayu Opak
  - Monev Pengajuan Permohonan Sertifikasi (Meminta kepada Satker agar mengajukan berkas permohonan)
  - Komunikasi Informal / Monev Periodik (Monev mingguan informal kepada Satker)
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Menyusun konsep BA pemeriksaan Bersama (Minggu I-III Oktober 2023)
  - Koordinasi ke DJKA, KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta IV, KUMHAM (Minggu I Oktober 2023)
  - Berkunjung ke 7 Kantah (Minggu IV Okt 2023)
  - Koordinasi ke BBWS dan PjN II (Minggu I November 2023)

Evaluasi Capaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan Tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	202,50%	123,53%	100%	124,40%	106,12%	131,15%
Capaian	120,00%	120,00%	100,00%	120,00%	106,12%	131,15%

### 9. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Penyelesaian berkas kasus Piutang Negara :
  - Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara s.d. triwulan IV tahun 2023 sebanyak **496 BKNP** atau **132,62%** dari Target tahunan (Q4) sebanyak **374 BKNP (100%)**.
- ✓ Akar Masalah:
  - Sebagian BKNP penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung BJ yang memadai / potensi tertagih rendah.
  - BKNP yang memiliki potensi dapat tertagih semakin berkurang.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Melanjutkan penurunan outstanding BKNP dengan optimalisasi Pengurusan Piutang Negara:
    - Dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kemampuan dan keberadaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang.
    - Mengirimkan surat tagihan penyelesaian hutang yang ditujukan kepada PH/PjH.
    - Selalu menginformasikan adanya Crash Program Tahun Anggaran 2023 berupa keringanan utang kepada PH/PjH penyerahan dari instansi pemerintah pusat.

- Melakukan sosialisasi PMK Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN.

✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

- Melakukan pemilahan BKNP.
- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka percepatan penyelesaian BKNP.

Evaluasi Capaian Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP Tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2020	2021	2022	2023
Target	100%	100%	100%	100%
Realisasi	111,63%	106,96%	140,18%	132,62%
Capaian	111,63%	106,96%	120%	132,62%

#### 10. Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien:
  - Realisasi indeks rata-rata penyelesaian layanan yang agile, efektif dan efisien s.d. triwulan IV tahun 2023 sebesar **99,97** dari **target 70** atau **142,81%**.
- ✓ Akar masalah:
  - Permasalahan terkait penilaian permohonan tidak lengkap/SOP pendek atau singkat terutama apabila terdapat beberapa permohonan sekaligus.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi:
  - Secara berkelanjutan, beriringan dengan survei penilaian, terus memberikan edukasi, komunikasi kepada satker/pemohon.

#### 11. Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) :
  - Realisasi evaluasi kinerja dan rekomendasi BMN tercapai 167 NUP dari target 167 NUP (100%)
  - Realisasi Pencapaian Tindak lanjut tercapai 16 NUP dari target 3 NUP (533,33%)  
 Perhitungan Capaian IKU =  $(80\% \times 100\%) + (20\% \times 533,33\%)$   
 $= 186,68\%$

- Capaian evaluasi Kinerja BMN s.d. triwulan IV tahun 2023 yaitu 186,68% berdasarkan target tahunan (Q4) sebesar 100%.
- ✓ Akar masalah
  - Target antara Evaluasi Kinerja BMN dan Pengukuran SBSK berbeda objek sehingga memerlukan waktu tersendiri.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Pembuatan tiket (167 NUP)
  - Menyusun variable isian pada SIMAN Portofolio (167 NUP)
  - Survey pendataan/penelitian lapangan
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Melanjutkan Perhitungan Kinerja BMN
  - Melanjutkan Penyusunan Rekomendasi Portofolio
  - Melanjutkan Survei Pendataan

Evaluasi Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2020	2021	2022	2023
Target	100%	100%	100%	100%
Realisasi	300%	122%	120%	186,68%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	186,68%

## 12. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction :
  - Jumlah frekwensi lelang e-auction s.d. triwulan IV tahun 2023 = 1.124
  - Jumlah frekwensi lelang e-conventional auction sd. triwulan IV tahun 2023 = 0
  - Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional sebesar 100%, sehingga capaian s.d. triwulan IV tahun 2023 dari target 94% adalah 106,38%
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Melaksanakan lelang secara e-auction sesuai ketentuan
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Melanjutkan pelaksanaan lelang e-auction sesuai ketentuan

Evaluasi Capaian Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* Tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	85%	90%	90%	92%	92%	94%
Realisasi	100% (117,65%)	100% (111,11%)	100% (111,11%)	100% (108,70%)	100% (108,70%)	100% (106,38%)
Capaian	117,65%	111,11%	111,11%	108,70%	108,70%	106,38%

### 13. Persentase pelaksanaan permohonan lelang online

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait pelaksanaan permohonan lelang online:
  - Jumlah permohonan lelang online 1113 dari total permohonan 1114 atau 99,91%.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan:
  - Melanjutkan pelaksanaan lelang *e-auction* sesuai ketentuan.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi:
  - Melanjutkan pelaksanaan lelang *e-auction* sesuai ketentuan

### 14. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait pengembangan kompetensi pegawai:
  - Target pengembangan kompetensi setiap pegawai = 30 Jam Pelatihan
  - Jumlah pegawai target pengembangan kompetensi pegawai = 48
  - Jumlah pegawai **telah memenuhi** target pengembangan kompetensi = 48
  - Jumlah pegawai **telah memenuhi & telah melebihi** target pengembangan kompetensi = 48
  - Capaian persentase pengembangan pegawai s.d. triwulan IV tahun 2023 sebesar **120 % dari target 100%**
  - Capaian IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan target tahunan =  $(48/48 + (20\% \times 48/48)) = 120\%$ .
- ✓ Akar masalah:
 

SDM: keterbatasan pegawai untuk di tugaskan sebagai bendahara dan minimnya pegawai berminat menjadi jafung perbendaharaan.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan:
  - Monitoring rutin dan asistensi kepada semua pegawai target untuk memanfaatkan semua fasilitas pengembangan kompetensi (diklat/pelatihan) yang ada baik

mandatory; usulan pembelajaran maupun open acces learning untuk memastikan setiap pegawai telah memenuhi minimal = 30 Jam Pelatihan.

- SDM: permintaan tambahan pegawai untuk formasi bendahara.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi:
  - Melanjutkan Monitoring rutin dan asistensi kepada semua pegawai target.

Evaluasi Capaian Persentase Pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	90%	87%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	96%	100%	120%	120%	120%	120%
Capaian	106,67%	114,94%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

#### 15. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait kualitas pelaksanaan anggaran :
  - Capaian IKU IKPA s.d. triwulan IV tahun 2023 adalah 105,20 dengan memperhitungkan aplikasi smart DJA.

Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi IKU IKKPA
$x \geq 98$	120
$95,5 < x < 98$	$100 + ((x - 95,5) : 0,125)$
$x = 95,5$	100
$80 < x < 95,5$	$80 + ((x - 80) : 0,775)$
$x = 80$	80
$x < 80$	79,9

- ✓ Akar Masalah :
  - Terdapat indikator pada Formulasi PKPA yang saling kontradiksi (penyerapan > < efisiensi) sehingga cenderung sulit mendapatkan nilai yang maksimal (100%);
  - Terdapat pilihan indikator efisiensi yang memiliki poin/porsi besar, sehingga harus menekan realisasi anggaran namun kegiatan operasional masih harus berlanjut;
  - Peraturan terkait penilaian IKPA yang sudah rigid membagi nilai per triwulan dan per jenis belanja. Seperti ketentuan menjaga maksimal penyerapan DIPA pada TW-IV, sedangkan load tusi mencapai puncaknya sehingga sulit mencapai efisiensi;

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Melakukan efisiensi anggaran khususnya pada uang harian perjalanan dinas.
  - Mengoptimalkan capaian output.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik dari sisi output maupun realisasi DIPA.
  - Koordinasi dengan para pemangku kepentingan internal;
  
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Melakukan rapat monev pelaksanaan anggaran.
  - Melakukan efisiensi anggaran dan meningkatkan capaian output.
  - Efisiensi PD 90% dari POK (namun diakhir masih dilonggarkan)
  - Efisiensi di DIPA Honorarium (mgkn kurang dari SBM 90 % POK)
  - Pengeluaran BBM yg tinggi kita Kelola lebih efisien. (Dexlite/Panther).

Evaluasi Capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	95%	95%	95%	95,5%	95,5%	100
Realisasi	100,92%	96,59%	97,80%	95,99%	94,06%	105,20
Capaian	106,23%	101,67%	108,95%	100,51%	98,49%	105,20%

#### 16. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan :
    - Berdasarkan hasil monev perhitungan pengadaan BMN dari beberapa komponen perhitungan diperoleh nilai sebagai berikut :
      - Komponen 1 Proses pangajuan Sertifikasi **(Nihil)**
      - Komponen 2 Pemanfaatan Alokasi BMN **(Nihil)**
      - Komponen 3 Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan perhitungan
        - a. Persentase Pemanfaatan Sirup (target 50%) capaian (78,91%/50%)= 1,58
        - b. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/seleksi **(Nihil)**
        - c. Persentase Pemanfaat E- Purchasing (target 60%) capaian (100%/60%)= 1,67
        - d. Persentase Pemanfaatan Non E-Tendering dan Non- E Purchasing (target 30%)  
Capaian (61,76%/30%) = 2,05
        - e. Persentase Pemanfaatan e-Kontrak **(Nihil)**
- Realisasi  $(1,58+1,67+2,05)/3 \times 100\% = 172\%$

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Penyampaian laporan bidang BMN =pengadaan tepat waktu.

#### 17. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN :
  - Deviasi PNBP Lelang : selisih data OMSPAN >< Dropbox = 0,00%
  - Deviasi PNBP PN : selisih data OMSPAN >< Focus PN = 0,0%
  - Realisasi nilai deviasi merupakan rata-rata dari kedua deviasi tersebut s.d. triwulan IV tahun 2023 sebesar **0,0%** atau **120%**
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
  - Pengendalian angka deviasi dengan selalu Monitoring sumber data capaian (OMSPAN, Dropbox, focus PN; rekap excel ) dan melakukan cek/konfirmasi data dengan cermat.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
  - Cek dan rekonsiliasi berkala PN dengan Bendahara (HI).

Evaluasi Capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian Tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2021	2022	2023
Target	12,5%	10%	15%
Realisasi	0,01%	0,65%	0,00
Capaian	120%	120%	120%

#### 18. Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait pengembangan kompetensi pegawai:

##### Formula perhitungan iku yaitu sbb :

- Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas risiko =(Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)
- Kertas kerja untuk pengelolaan kinerja belum ada sedangkan kertas kerja kualitas manris terdapat pada link : [IKU Reviu PK dan IKMR.xlsx](#)

- [Kertas Kerja Pengelolaan Kinerja Organisasi.xlsx](#)
- Berdasarkan hasil reviu indeks pengelolaan kinerja organisasi dan Manajemen risiko telah diperoleh nilai sebagai berikut :
  - Indek Pengelolaan Kinerja Organisasi 99,69
  - Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai 95,78
  - Indeks Pengelolaan kinerja  $(99,69+95,78)/2 = 97,74$
  - $(\text{Pengelolaan Kinerja } 60\% \times 97,74 = 58,64) + (\text{Manajemen Risiko } 40\% \times 98,98 = 39,59) = 98,23$
  - Dengan target 80 maka capaian 122,79%.
- ✓ Akar masalah:
  - Semua aspek kegiatan dalam rangka pengelolaan kinerja hendaknya didokumentasikan dengan baik dan didukung oleh segenap jajaran pegawai.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan:
  - Telah dilaksanakan sosialisasi/internalisasi KMK-300/2022 terkait Manajemen Kinerja pada tanggal 27 Januari 2023.

Evaluasi Nilai Review Pengelolaan Kinerja Tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	70	72	70	75	80	80
Realisasi	82,63	83,38	95,96	94,25	97,30	98,23
Capaian	118,04%	115,81%	120%	120%	120%	122,79%

### 19. Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait pengawasan dan pengendalian yang efektif:
  - Berdasarkan hasil monev kertas indeks pengawasan telah diperoleh nilai sebesar 97,28 dengan target 60 capaian sebesar 162,13%.

### C. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2023 seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DIPA tahun 2023. Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 1.789.670.000,00. Selama TA 2023 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp1.670.329.603,00 atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar 93,33%.

Adapun realisasi anggaran sebesar 93,33% tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2023 adalah sebesar Rp57.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp56.325.000,00 atau sebesar 97,37%.

#### 2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.731.825.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.614.004.603,00 atau sebesar 93,20%.

**Tabel Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 50%)</b>			<b>99,66</b>
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100,00	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	98,63	20	19,73
4. Belanja Kontraktual	0,00	0	0,00
5. Penyelesaian Tagihan	0,00	0	0,00
6. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100,00	5	5,00
8. Capaian Output	100,00	25	25,00
<b>B) Nilai SMART (Bobot 50%)</b>			<b>92,64</b>
1. Capaian Output	100,00	43,50%	43,50
2. Efisiensi	76,90	28,60%	21,99
3. Konsistensi RPD	99,44	18,20%	18,10
4. Penyerapan Anggaran	93,33	9,70%	9,05
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV</b>			<b>96,15</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV</b>			<b>105,21</b>

Sejak mulai tahun 2021 anggaran belanja pegawai sudah terpusat pada DIPA Eselon I bahkan pada akhir 2022 secara bertahap diahlikan pada DIP Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga unit vertikal tidak memperoleh pagu belanja pegawai.

Terdapat perbedaan persentase realisasi anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi capaian IKU, dimana berdasarkan laporan realisasi anggaran, penyerapan sebesar 93,33% (belanja barang dan modal) sedangkan menurut realisasi

capaian IKU sebesar 105,21%. Hal ini terjadi karena pada realisasi capaian IKU selain memperhitungkan penyerapan anggaran juga memperhitungkan pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi, dimana dalam memperhitungkan capaian IKU tersebut terdapat formula penghitungannya sendiri dan masing-masing realisasi penyerapan anggaran, realisasi pencapaian keluaran riil, realisasi efisiensi dan realisasi konsistensi memiliki pembobotan tersendiri dalam formula penghitungannya.

## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2023 dengan sangat baik. Seluruh target atas 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dengan total 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2023 dapat tercapai dengan sempurna, bahkan melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar **116,36%** dari nilai maksimal 120%.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para *stakeholder*;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu terhadap seluruh pegawai;

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Purwokerto dapat berjalan dengan mudah. Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Purwokerto pada tahun 2023 ternyata masih terdapat perolehan nilai capaian indikator kinerja utama yang belum memuaskan dan juga masih adanya beberapa permasalahan yang menonjol yang

merupakan hambatan pada tahun 2023. Maka dari itu, untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah dimaksud sebagaimana telah diuraikan dalam komentar (ringkasan eksekutif) di atas. Dalam perjalanannya KPKNL Purwokerto menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;
2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Data PNBPN BMN sering terlambat masuk di awal bulan (melewati tanggal laporan LCK)
4. Proses sertifikasi terkendala dengan belum adanya BAST dari Pemprov Jateng kepada Satker PJJ II.
5. Penyerahan BKPN dari Kantor Pusat tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai yang memiliki kekuatan hukum;
6. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
7. Masih banyak outstanding BKPN lama dan banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
8. Sebagian BKPN penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung BJ yang memadai / potensi tertagih rendah
9. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
10. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
11. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP);
12. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
13. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;
14. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, lelang Hak Tanggungan yang masih terkendala pengosongan, kondisi pandemi covid-19;

15. Terdapat indikator pada Formulasi PKPA yang saling kontradiksi sehingga cenderung sulit mendapatkan nilai yang maksimal
16. Terdapat penambahan anggaran belanja modal dipertengahan tahun yang membuat nilai IKPA OMPSAN tidak bisa maksimal
17. Wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

## B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Purwokerto adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Purwokerto agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Purwokerto lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang *e-auction*;
6. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 213/PMK.06/2020 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;

7. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya e-auction (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara),
8. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
11. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
13. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
14. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
15. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
16. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara dan sertifikasi BMN;
17. Melaksanakan kegiatan SEMBARI “Semangat Menyambut Mentari” yaitu program sapa pagi dari Kepala KPKNL Purwokerto untuk memastikan semua pegawai dalam keadaan sehat dan *me-riveuw* agenda pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan;
18. Melaksanakan program BLAKASUTA “Blak – Blakan Suka Cerita” yaitu program sharing informasi terkait tugas dan peraturan terbaru dari masing - masing Seksi dan Fungsional, sehingga seluruh pegawai dapat memahami tugas dan fungsi KPKNL Purwokerto dengan baik

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tahun anggaran 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja khususnya Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dan Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing yang pada akhirnya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pula pada masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.